

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman, A. (2024). *Perbuatan Melawan Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Isnaini, N., & Kusuma, A. (2023). *Hukum Teknologi Informasi dan Perlindungan Konsumen Digital*. Malang: UB Press.
- Kansil, C.S.T. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muchsin, M., Supriyadi, A., & Rachmat, H. (2022). *Hukum Badan Usaha Milik Negara: Kedudukan, Fungsi, dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Palupi, Y. T. (2023). *Hukum Perdata Indonesia: Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ramli, A. M. (2022). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Paradigma baru UU No. 27 Tahun 2022*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Samosir, R. R. (2025). *Membangun Kepercayaan Sinergi Antara Rahasia Bank dan Perlindungan Informasi Nasabah*. Pekanbaru: CV. Bravo Press Media.

Saputra, E. (2025). *Pengantar Hukum Bisnis: Regulasi, Etika, dan Tanggung Jawab Korporasi*. Jakarta: Nasmedia.

Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Redy Rahmat Samosir. (2025). *Membangun Kepercayaan Sinergi Antara Rahasia Bank dan Perlindungan Informasi Nasabah*. Pekanbaru. CV. Bravo Press Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

C. Jurnal

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. DOI : <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Afrilia, D., & Bondowoso, S. B. (2025). Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan Dan Pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 13–22. DOI : <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1400>

Akbar, H., & Wicaksana, P. B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 239–248. DOI : <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1333>.

Alfarabi & Romainur. (2024). Peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 15–28.

Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 1-12. DOI : <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 492–502. DOI : <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>

- Andi. (2024). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115-131.
- Anindya, E. A., & Nurkhaerani, E. (2026). Analisis yuridis kebocoran data dalam kerangka perlindungan data pribadi di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 99-108.
- Anindya, R. P., & Putra, M. R. S. (2025). Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 1105–1112.
- Arafah, A. H. N., et al. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Perjanjian Online Perspektif Hukum Perdata. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 496–505. DOI : <https://doi.org/10.47701/label.v2i1>.
- Arafat, M., & Nugraha, S. U. (2026). Tanggung Jawab Direksi–Komisaris Pasca Serangan Siber: Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule. Equality: *Journal of Law and Justice*, 3(1), 26–49. DOI : <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i1.511>.
- Ariffin, B., & Renaldy, R. (2023). Meningkatkan Peranan Perusahaan BUMN yang Sudah Go Publik dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Bisnis Berbasis Budaya dan Kepastian Hukum. *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 36–43. DOI : <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2079>
- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369–392. DOI : <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>
- Asetko, T. U., Sahay, T., & Wijaya, A. (2026). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2888–2900. DOI : <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4801>

- Asiyanti, A. P. D., & Agussalim. (2024). Strategi Manajemen Risiko dan Keamanan Siber dalam Ekonomi Digital: Tinjauan Literatur. *Jurnal Penelitian Sistem Informasi (JPSI)*, 2(4), 90–110. DOI : <https://doi.org/10.54066/jpsi.v2i4.2562>
- Astiti, N. P. Y., & Suryanti, N. W. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Keuangan pada Departemen Purchasing: Penerapan DRR dan Analisis Vendor. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 5(1), 35–44. DOI : <https://doi.org/10.22334/jam.v5i1.75>
- Atara, I., Syallomeita, S., & Haksoro, R. A. B. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Data Pribadi Di Era Digital: Studi Kasus Kebocoran Data Pengguna Aplikasi Mypertamina Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(2), 129–140. DOI : <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.787>
- Ayuningtias, V. K., & Gultom, E. (2024). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 288–298. DOI : <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1569>
- Azzahra, E. A., & Nurkhaerani, E. (2025). Analisis Yuridis Kebocoran Data LinkedIn 2021 dalam Kerangka UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 1–10. DOI : <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1701>
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985. DOI : <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Badriah, L., Indiahono, D., & Sukarso, S. (2024). Akuntabilitas dalam kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia: Belajar dari Korea Selatan dan Singapura. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 89–102. DOI : <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.89-102>.
- Bidasari, A., et al. (2025). Tanggung Jawab Perdata Dalam Kegagalan Sistem Pembayaran Digital: Analisis Pasal 1365 KUHPperdata.

Jurnal Kolaboratif Sains, 8(12), 9036–9044. DOI : <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9669>

Cecilia, et al. (2025). Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Privasi Data Pribadi di Internet. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(6), 1624–1630. DOI : <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1068>

Chushairi, S. M., Fithry, A., & Rusfandi. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 89–122. DOI : <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4664>

Dachlan, A. A., et al. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Dalam Kebocoran Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 109–124. DOI : <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11279>

Darmawan, F., & Arianto, H. (2025). Upaya Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Kemkomdigi Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 3678–3688. DOI : <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1741>

Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251. DOI : <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>

De Vries, S. H., & Damayanti, R. (2025). Implikasi dualitas kedudukan BUMN terhadap kemandirian korporasi dan fungsi pelayanan publik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2226–2240. DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p05>

Dharma, D. A. P., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan Data Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 26(1), 51–60. DOI : <https://doi.org/10.31599/3rtwfd20>

- Eryasafli, R. A., Maharani, S., & Zakwan, M. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia: *Analisis Mekanisme Pengaduan Internal, Mediasi LAPSPI, dan Litigasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 123–130. DOI : <https://doi.org/10.65310/d70tgc86>
- Facrurozi, M., & Suryokencono, P. (2025). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebocoran Dana Milik Konsumen Pada Aplikasi Dana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1–7. DOI : <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4675>
- Farhan, A. (2022). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS*, 2(1), 947–951.
- Fauzadeli, M. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana. *Qistie*, 15(2), 224–238. DOI : <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i2.7509>
- Febiana, I., & Irawan, M. D. (2023). Perancangan Aplikasi Input Laporan Data Single Line Diagram Unit Layanan Pengadaan PLN SUMUT. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 2(2), 118–130. DOI : <https://doi.org/10.70340/jirsi.v2i2.22>
- Firmansyah, A., Machmud, A., & Suparji. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: *Sebuah Kajian Hukum Korporasi*. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517–528. DOI : <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Ghassani, C., Putra, F. P., & Firdaus, Z. (2025). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata atas kebocoran data pribadi nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2), 139–151.
- Hariru, L. O., Tolo, S. B., & Niasa, L. (2023). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 160–168. DOI : <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.99>

- Hasanudin, T. A. (2026). Perlindungan Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Penanggulangan Kejahatan Digital Berbasis Social Engineering: *Analisis Hukum Perbankan Indonesia*. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 99–115. DOI : <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7476>
- Hasian, D. P., & Fitria, A. (2025). Pertanggungjawaban Telkomsel Atas Kebocoran Rahasia Data Pribadi Pengguna Indihome. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1812–1821. DOI : <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1440>
- Herwibowo, B. H., Maryano, M., & Mau, H. A. (2025). Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1491–1503. DOI : <https://doi.org/10.61253/cendekia.v2i8.478>
- Islami, M. F. (2025). Evaluation of Government Policy Implementation in the Abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises for Economic Structural Reform. *Journal of State Public Policy*, 1(1), 38–50. DOI : <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i1.237>
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan proporsional dan ketidaksetaraan perlakuan dalam teori keadilan Aristoteles. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 19(1), 54-78. DOI : <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.528>
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4), 1–8. DOI : <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>
- Kholifah, A., & Baso, F. (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 143–180. DOI : <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.143-180>
- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan

dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86–103. DOI : <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3681>

Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., & Suwardi. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740–756. DOI : <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2157>

Kurnia, T. T., & Mahmud, A. (2025). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Korban Kejahatan Akses Ilegal dan Upaya Pencegahannya. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 613–622. DOI : <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.19218>

Kurniawan, L. (2022). Data protection and corporate liability in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–367. DOI : <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3456>

Mahameru, D. E., et al. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia. *Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. DOI : <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.240>

Mamduh, M. (2022). Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Pidana BUMN Sebagai Korporasi Terhadap Kerugian Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 9873–9879.

Mandala, A. F., & Firmansyah, H. (2025). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online; Analisis Teori Vicarious Liability. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 193–207. DOI : <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.11378>

Mas'ud, I., et al. (2026). Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pada Platform E-commerce di Indonesia. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(1), 1428–1436. DOI : <https://doi.org/10.36040/jati.v10i1.16986>

- Maulida, O., & Utomo, H. (2023). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 1–9. DOI : <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>
- Murdani, M. R. (2025). Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta. *The Officium Nobile Journal*, 2(2), 43–52. DOI : <https://doi.org/10.70656/tonji.v2i2.595>
- Najib, S. I. S. (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam. *Jurist-Diction*, 7(4), 753–778. DOI : <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.63931>
- Neu, A. A., Puluhulawa, R. U., & Puluhulawa, J. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi. *Journal of Comprehensive Science*, 2(1), 78–83. DOI : <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.185>
- Nora, A., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 66–82. DOI : <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2706>
- Nukhaerani, E. (2024). Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38. DOI : <https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.165>
- Nurhayati, E. S., & Laksmi. (2023). Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi oleh Media Online. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7(4), 573–590. DOI : <https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.573-590>
- Nurrohmah, A. S., & Nur, H. (2026). Analisis Yuridis Kebocoran Data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Equality: Law and Social*, 1(4), 239–245. DOI : <https://doi.org/10.66618/grhtvt06>

- Nusantara, A. H. S., Umam, I. K., & Lubis, M. (2024). Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan. *Nuansa Informatika*, 18(2), 1–8. DOI : <https://doi.org/10.25134/nuansa.v18i2.9786>
- Parhusip, J., Sorisa, C., & Kiareni, C. L. (2024). Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 586–593. DOI : <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2996>
- Pasyah, R. A., & Gunadi, A. (2025). Penerapan Fiduciary Duty Terhadap Direksi Dalam Kasus Pencurian Aset Oleh Pekerja. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 53–57. DOI : <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7903>
- Putra, A. R. (2026). Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 16(1), 1–22. DOI : <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14412>
- Putra, Y., & Sari, D. (2021). Kebocoran data BPJS Kesehatan dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 233–250. DOI : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>
- Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). Tanggung Jawab Prosesor Data Terhadap Kebocoran Data Pusat Data Nasional Tahun 2024. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 29–34. DOI : <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.4981>
- Putri, N. M. D. G., Mahendrawati, N. L. M., & Ujjianti, N. M. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 240–245. DOI : <https://doi.org/10.55637/jph.5.2.8618.240-245>

- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 103–120. DOI : <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>
- Rahardjo, I. S. (2025). Evolusi Doktrin Ultra Vires Dalam Tata Kelola Keputusan Digital dan Big Data Pada Perusahaan Modern. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 5(2), 1–17. DOI : <https://doi.org/10.61696/juwira.v5i2.986>
- Rahman, F. (2021). Kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81–102. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>
- Ramadhani, S. A. (2022). Komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 73-84. DOI : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>
- Rauf, A., et al. (2025). Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 14(2), 117–126. DOI : <https://doi.org/10.36774/sisiti.v14i2.1732>
- Rifurio, M. H. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Konsumen E-commerce di Indonesia. *LEXORIA Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia*, 1(1), 107–117. DOI : <https://doi.org/10.2025/rdxs0434>
- Rizky, M., Apriyani, R., & Aripkah, N. (2026). Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perdagangan data pribadi dalam UU PDP. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 117–130.
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>

- Sane, M., et al. (2025). Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–25. DOI : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.3170>
- Sanjaya, H., Salman, R., & Hakim, A. R. (2026). Implikasi dan Tata Kelola Digitalisasi Pengawasan Kepatuhan Hukum Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN) (Studi Pada PT Indonesia Chemical Alumina). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 7(1), 47–61. DOI : <https://doi.org/10.22225/juinhum.7.1.2026.47-61>
- Savitri, Z. A., Amirulloh, M., & Susanto, M. (2025). Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 235–253. DOI : <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11385>
- Setiawan & Wardhani, I. P. (2026). Evaluasi Efektivitas Pemetaan Keamanan Siber Dalam Penerapan Sistem Keamanan Informasi Berbasis ISO/IEC 27001:2022 PT JASA RAHARJA. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(2), 2787–2794. DOI : <https://doi.org/10.36040/jati.v10i2.17827>
- Shodiq, R., et al. (2025). Konstruksi Hukum Perdata terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Komersial: Analisis Perspektif Hak Keperdataan Digital. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 137–149. DOI : <https://doi.org/10.51903/qe3ppy06>
- Siagian, D. G., et al. (2025). Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelanggan Melalui Digitalisasi Sistem Penanganan Keluhan di PT PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 401–417. DOI : <https://doi.org/10.35931/ak.v5i2.5152>
- Sibuea, R. P., & Susanti, E. (2026). Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4630-4641. DOI : <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6027>

- Soleh, M., & Tjenreng, Z. (2025). Strategi Prevention Kebocoran Data Pelayanan Publik Di Era Digital. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(1), 1–10. DOI : [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).20524](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).20524)
- Suciara, A., et al. (2026). Strict liability vs fault based: Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 739–749. DOI : <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3146>
- Suhaila, S., et al. (2026). Pertanggungjawaban Negara Dalam Kebocoran Data Pada Platform E-Government: Analisis Hukum Administrasi Atas Kasus Satu Sehat dan DPMPTSP Online. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(2), 12–21. DOI : <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2166>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sunaryo. (2022). Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22. DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Syahrial, S. M., et al. (2026). Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap insiden siber kebocoran data pribadi. *Technology and Economics Law Journal*, 5(1), 747-774.
- Syawaldi, E., & Triadi, I. (2024). Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok Class Action. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, 1(2), 1–9. DOI : <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.132>
- Tarigan, V. C. E., Yulida, D., & Wiatmaja, G. (2025). Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis Dalam Perspektif Perbandingan Internasional. *Locus: Jurnal*

Konsep Ilmu Hukum, 5(3), 543–555. DOI :
<https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.833>

Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(4), 40–52.

Wahyono & Cahyo. (2025). Pertanggungjawaban Direksi Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 145–151. DOI :
<https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.634>

Waspiah, W., Lies, A., Islami, T., & Wida, N. S. (2023). Model perlindungan hukum data pribadi di era digital guna menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5165–5179. DOI : <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>

Widarto, J., & Runekawati, M. (2025). Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah di Era Digital: Studi pada PT. BPR Prima Sejahtera berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2571–2579. DOI :
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1526>

Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi di smartphone. *Journal Inicio Legis*, 3(1), 63–72. DOI :
<https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14873>

Wijaya, J., & Nursanthy, A. T. R. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi dalam berselancar di dunia maya. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(2), 638-644. DOI :
<https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1477>

Wildan, M., Ramadhan, D. R. C., & Wijayanti, Z. R. (2024). Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau

Dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 392–397. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201758>

Wilopo, M. I. M. (2026). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 10(1), 183–189. DOI : <https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.183-189>

Yolanda, E., & Hutabarat, R. R. (2023). Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif. *Journal of Syntax Literate*, 8(6), 4166–4182. DOI : <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12583>

Yuni, L. A., & Wahyu, M. (2025). Perbandingan Organisasi Sektor Publik Dan Sektor Swasta: Tujuan, Pembiayaan, dan Struktur. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 989–1004. DOI : <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.588>

Zholila, Z. (2025). Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Konteks Big Data dan Profiling Konsumen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 266–273. DOI : <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2434>

D. SKRIPSI

Dirgantara, M. "Pertanggungjawaban hukum PT Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Lestari, T. "Tanggung jawab penyelenggara platform jual beli online terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan UU ITE dan Pasal 1366 KUHPperdata." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2021.